

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional

Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (legitimate) serta layak untuk didukung (Ridha dan Basuki, 2012). Teori Institusional yang dikemukakan oleh Scott (2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.

Teori Institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektesi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015).

Penyesuaian terhadap harapan eksternal atau harapan harapan sosial dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan pribadi mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung fokus pada perolehan legitimasi maka bisa jadi akan memiliki kesamaan atau *isomorfisme (isomorphism)* dengan organisasi publik lainnya. Perspektif yang dikemukakan oleh Ridha dan Basuki (2012) menyebutkan bahwa muncul bentukan-bentukan dari Institusional yang bersifat *isomorphism*.

2.1.2 *Isomorfisme* Institusional

Isomorfisme (isomorphism) yaitu suatu proses yang mendukung atau mendorong satu unit kedalam populasi untuk menyerupai unit yang lainnya guna menghadapi pada kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan suatu kemiripan (Ridha dan Basuki, 2012)

Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan adanya *koersif* (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), *normatif* (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior), dan *mimetik* (ketika

organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). *Isomorfisme* koersif merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan. *Isomorfisme* normatif adalah bentuk komitmen manajemen, dimana didalam organisasi jika semakin tinggi *isomorfisme* normatif maka tujuan organisasi akan tercapai maksimal. Sedangkan *isomorfisme* mimetik merupakan terjadinya ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi, dimana ketika terjadi *isomorfisme* mimetik atasan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Syarmenda (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu hasil berupa laporan mengenai keuangan organisasi dalam satu periode yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku guna menyediakan informasi posisi keuangan organisasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Fitrianto (2015) tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang terdiri atas perusahaan unsur-unsur laporan keuangan kepada pihakberkepentingan dalam memberikan suati nilai kinerja keuangan terhadap perusahaan dan pihak manajemen. Menurut PASP No.01 Lampiran 1.02 (2010) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dari uraian-uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai perubahan unsur-unsur keuangan yang digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi kepada para pihak-pihak yang terkait.

2.1.3.3 Manfaat Laporan Keuangan

Adha (2014) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan sebagai :

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.
2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yangb terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya
4. Membantu dalam evaluasi tingkat efesiensi dan efektivitas.

Kesimpulan dari manfaat laporan keuangan adalah memberikan informasi kondisi keuangan suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan.

2.1.3.4 Jenis Laporan Keuangan

PSAP No.01 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual (2010) menyebutkan jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah/pusat, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu laporan keuangan daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, alporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.4 Pelaporan Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan. Hal yang dimaksud adalah seperti informasi sumber daya organisasi yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Syarmenda, 2016). Menurut Adha (2014) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan daerah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Perbedaan penjelasan-penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pelaporan keuangan daerah adalah informasi mengenai kondisi keuangan yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk melihat posisi keuangan suatu organisasi.

2.1.4.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuan pelaporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standart Board* (GASB,1998) adalah sebagai berikut :

- a) Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
- b) Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, kemampuan atau sumber daya guna memperoleh informasi dan oleh sebab itu pihak terkait menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi yang penting.

Menurut Asroel (2016) tujuan dari pelaporan keuangan merupakan memenuhi tingkat pengungkapan laporan keuangan ditambah dengan informasi operasional organisasi secara keseluruhan dengan data-data yang dianggap cukup. Sehingga dari kedua pemaparan diatas

kesimpulannya adalah tujuan pelaporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2.1.5 Transparansi Pelaporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Transparansi

Syarmenda (2016) mendefinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam bentuk jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasinya. Menurut Fitrianto (2015) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Adha (2014) mendefinisikan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang aktivitas pemerintahan. Penerapan transparansi organisasi publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal. Ridha dan

Basuki (2012) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan.

Organisasi yang mementingkan adanya transparansi publik akan menjadi rentan pada kritikan yang berasal dari *stakeholders*, karena para *stakeholders* sendiri dapat melihat gambaran mengenai organisasi secara terbuka. Organisasi publik akan memperoleh legitimasi, stabilitas, dan sumber daya jika sesuai dengan harapan publik. Organisasi publik akan menghadapi risiko transparansi, dimana apabila organisasi tidak bisa memastikan apa yang menjadi harapan publik dan cara pemangku kepentingan akan menggunakan informasi yang disampaikan atau dibuat oleh organisasi publik.

Ketiga penjelasan tersebut disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu-individu maupun organisasi-organisasi dalam memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan dalam organisasi secara terbuka, lengkap, dan akurat kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak-pihak yang terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.2 Bentuk-bentuk Transparansi

Menurut Adha (2014) menjelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk transparansi yaitu :

1. Penyediaan informasi yang jelas

Penyediaan informasi yang jelas sangat penting karena untuk mempermudah pihak-pihak pengakses informasi laporan keuangan agar tidak kesulitan.

2. Kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan.

Suatu organisasi wajib untuk menyediakan akses informasi yang sekiranya suatu informasi tersebut mudah untuk didapatkan oleh pihak yang membutuhkan informasi.

3. Meningkatkan arus informasi

Menerapkan transparansi tidaklah mudah beberapa hambatan pasti akan muncul karena berbagai faktor, maka dari itu untuk menjaga kestabilan dalam penerpan transparansi dibutuhkan peningkatan arus informasi. Informasi yang dimaksudkan adalah informasi yang terus menerus memberikan keupdetan data yang sekiranya dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan.

Bentuk-bentuk transparansi dapat disimpulkan yaitu transparansi dapat saja berupa penyediaan informasi

yang jelas kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan, dan meningkatkan arus informasi.

2.1.5.3 Tujuan Transparansi

Menurut Sari (2017) menyebutkan tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh *stakeholder* dan lembaga yaitu :

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
3. Mendorong masyarakat untuk selalu bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan atas seluruh pihak dari aktivitas yang dilakukan
5. Tercapainya pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.

Pendapat lain mengenai tujuan transparansi dijelaskan bahwa penerapan transparansi bertujuan agar dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, serta tercapainya tujuan

(Yesnita, 2016). Pemaparan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa tujuan transparansi yaitu untuk mencegah dan menghindari penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan dalam sebuah organisasi guna tercapainya pelaksanaan kegiatan organisasi secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait.

2.1.5.4 Manfaat Transparansi

Menurut Sari (2017) terdapat manfaat penting adanya penerapan transparansi pelaporan keuangan yaitu :

- a) Mencegah korupsi
- b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha
- d) Menguatnya kohesi sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi
- e) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.

Berbeda halnya dengan Yesnita (2016) manfaat dari transparansi adalah untuk menciptakan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggungjawab suatu organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktik yang dilakukannya. Berdasarkan pendapat diatas, sehingga dapat

disimpulkan manfaat dari transparansi adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap aktivitas pada suatu organisasi.

2.1.5.5 Indikator-indikator Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator transparansi pelaporan keuangan, yaitu:

1. Keberhasilan pencapaian

Keberhasilan SKPD yang dimaksud adalah kemampuan anggotanya dalam bekerja dalam SKPD akan menentukan suatu anggapan. Apabila SKPD berhasil menunjukkan kinerja yang baik pada publik maka publik akan semakin mempercayai segala aktivitas dan kebijakan yang dilakukan oleh SKPD.

2. Ketidakberhasilan pencapaian

Tidak menutup kemungkinan apabila SKPD mengalami ketidakberhasilan dalam suatu hal, salah satunya adalah laporan keuangan yang mungkin dikarenakan oleh beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut. Ketidakberhasilan tetap harus dipublikasikan kepada publik, karena publik yang mengerti akan penyebab ketidakberhasilan akan

menyadari hal tersebut. Informasi untuk saat ini menjadi suatu hal yang wajib untuk dipublikasikan.

3. Akurat dan tepat waktu

Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan tuntutan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dari itu dibutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu pada penyusunan laporan keuangan.

4. Informasi input, output, dan *outcome*

Informasi keuangan mengenai input, output, dan *outcome* merupakan informasi yg penting bagi pihak yg membutuhkan, karena dianggap mampu mempengaruhi hal-hal penting yang akan dilakukan oleh pihak terkait.

5. Akses *stakeholder*

Bagian penyusunan laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting, karena mereka sangat mengerti seluk beluk penyusunan tersebut, sehingga diharuskan untuk menyediakan akses pada pemangku kepentingan agar pihak tersebut mengerti akan keadaan keuangan suatu organisasi.

2.1.6 Tekanan Eksternal

2.1.6.1 Pengertian Tekanan Eksternal

Menurut Syarmenda (2016) menjelaskan bahwa tekanan eksternal adalah tekanan yang mampu mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Tekanan eksternal merupakan suatu hal yang terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan, eksekutif, masyarakat, dan sebagainya (Masruroh, 2015).

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Solin (2013) tekanan eksternal yaitu dorongan atau penolakan untuk dilaksanakannya sebuah kebijakann yang berasal dari luar organisasi. Dorongan yang dimaksud adalah dukungan atau penolakan dari masyarakat, ataupun dorongan atau larangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukkat dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Suatu hal yang terkait dengan lingkungan sekitar organisasi pasti terkait dengan *isomorfisme koersif*. *Isomorfisme koersif* merupakan hasil tekanan dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain, dimana suatu organisasi menjalankan fungsinya. Kekuatan koersif yaitu tekanan eksternal yang

diberikan oleh pemerintah, peraturan lembaga lain untuk mengadopsi struktur ataupun sistem (Asworth,2009) dalam Ridha dan Basuki (2012). Peraturan dibuat untuk mengatur praktik-praktik yang ada agar menjadi lebih baik, disisi lain kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menimbulkan kecenderungan organisasi untuk mendapatkan atau memperbaiki, sehingga hanya memfokuskan pada aspek-aspek positif agar organisasi terlihat baik dihadapan pihak-pihak luar organisasi.

Perubahan pada organisasi yang didasari oleh kekuatan koersif akan menimbulkan organisasi lebih memikirkan pengaruh politik daripada teknisnya. Praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, terutama berhubungan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan organisasi yang lebih cenderung dipengaruhi politik. Perbedaan penjelasan tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu, tekanan eksternal adalah suatu tekanan ataupun dorongan yang berasal dari luar organisasi yang mampu mempengaruhi kinerja dan kemampuan dalam organisasi.

2.1.6.2 Macam-macam Tekanan Eksternal

Yesnita (2016) menyatakan bahwa macam-macam tekanan eksternal adalah :

1. Adanya pengaruh politik

Politik merupakan salah satu bentuk dari tekanan eksternal, dimana perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang akan terjadi dalam organisasi khususnya terkait pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal tersebut akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi.

2. Adanya peraturan undang-undang (regulasi)

Adanya peraturan adalah untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Namun disisi lain, menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh legitimasi saja, sehingga hanya menekankan aspek-aspek yang positif saja agar suatu organisasi terlihat baik oleh pihak luar.

Menurut Solin (2013) menyebutkan macam-macam tekanan eksternal yaitu :

1. Adanya peraturan (regulasi)

Adanya peraturan adalah untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Namun disisi

lain, menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh legitimasi saja, sehingga hanya menekankan aspek-aspek yang positif saja agar suatu organisasi terlihat baik oleh pihak luar.

2. Desakan masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan, adanya desakan masyarakat untuk pengungkapan pelaporan keuangan membuat pemerintah merasa bahwa hal tersebut memang penting untuk dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik juga.

3. Desakan atau dorongan dari pihak tertentu

Pihak tertentu maksudnya seperti lembaga swadaya masyarakat, media masa. Pihak tersebut merupakan tekanan yang berasal dari luar yang bisa jadi mempercepat ataupun memperlambat proses transparansi, tergantung suatu organisasi dalam menyikapinya.

Beberapa uraian mengenai macam-macam tekanan eksternal, diambil kesimpulan yaitu tekanan eksternal dapat berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, desakan masyarakat dan pihak yang terkait, serta dari pengaruh politik, ataupun bisa dari yang lain-lainnya.

Tekanan eksternal bisa mempercepat ataupun memperlambat proses transparansi, bisa dilihat dari bagaimana cara suatu organisasi tersebut menanggapi tekanan tersebut.

2.1.6.3 Indikator-indikator Tekanan Eksternal

Menurut Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam tekanan eksternal, yaitu :

1. Undang-undang dan peraturan

Undang-undang merupakan peraturan untuk menerapkan transparansi, adanya undang-undang yang telah mencantumkan sanksi mengenai penerapan transparansi, maka memudahkan suatu organisasi untuk membudayakan transparansi tersebut. Adanya sanksi seolah-olah suatu organisasi akan berhati-hati beraktivitas dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Tuntutan pihak terkait

Tuntutan dari Gubernur/Bupati dan juga dari seorang pengusaha dalam penerapan transparansi tentunya akan memunculkan dampak positif. Tuntutan tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk tercapainya penerapan transparansi pelaporan keuangan.

3. Tekanan media masa

Media masa memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan, mereka menuntut laporan keuangan yang akurat untuk selalu dipublikasikan agar pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut mudah mendapatkannya.

4. Kritikan masyarakat

Munculnya kritik dari masyarakat akan semakin memperkuat penerapan transparansi pelaporan keuangan karena kritikan masyarakat yang baik akan membangun transparansi tersebut.

5. Perhatian lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan akan menyampaikan aspirasinya guna transparansi tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat.

2.1.7 Komitmen Manajemen

2.1.7.1 Pengertian Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen sebagai penerimaan yang kuat pada individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, individu yang berupaya dan berkarya yang memiliki hasrat untuk tetap bertahan diorganisasi tersebut (Yesnita, 2016). Menurut Syarmenda (2016) mendefinisikan bahwa komitmen manajemen yaitu

kemampuan dan kemauan guna menyalurkan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi.

Komitmen manajemen yaitu komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan antara anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya pada organisasinya tersebut (Solin, 2013). Individu yang komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Mereka akan menumbuhkan loyalitas yang tinggi terhadap organisasinya untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan mempunyai keyakinan yang pasti, guna mewujudkan tujuan organisasi. Menurut DiMaggio dan Powel (1983) dalam Sihalo (2013) menjelaskan bahwa isomorfisme normatif yang terkait dengan profesionalisme. Perubahan institusional dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi.

Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih mendalam, dan juga lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud dengan baik ketika diikuti oleh

komitmen manajemen yang kuat. Institusional sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter yang ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Ridha dan Basuki, 2012).

Kesimpulan komitmen manajemen dari ketiga pendapat tersebut adalah suatu kemauan antara individu dengan organisasi yang ditempati untuk saling menelaraskan pemikiran dan saling bekerja sama, guna mencapai tujuan yang maksimal dalam organisasi.

2.1.7.2 Komponen Komitmen Manajemen

Menurut Masruroh (2015) menyebutkan 3 komponen dalam komitmen manajemen yaitu :

1. Komitmen afektif

Komitmen afektif terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosi.

2. Komitmen continue

Komitmen continue terjadi apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain.

3. Komitmen normatif

Komitmen normatif terjadi karena nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi

sebab ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi adalah hal yang penting untuk dilakukan.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komponen komitmen manajemen adalah suatu komitmen yang terjadi karena disebabkan oleh beberapa keinginan ataupun keadaan yang dialami oleh masing-masing individu agar tetap bertahan dalam sebuah organisasinya tersebut.

2.1.7.3 Indikator-indikator Komitmen Manajemen

Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam komitmen manajemen, yaitu :

1. Keinginan menjadi pimpinan

Tidak menutup kemungkinan seorang individu dalam organisasi ingin menjadi seorang pimpinan, hal tersebut akan mempengaruhi penerapan transparansi karena komitmennya untuk memimpin suatu organisasi.

2. Perbaikan ketrampilan staf

Penerapan transparansi akan menjadi optimal ketika pimpinan memotivasi bawahannya dan juga keinginan yang muncul dari individu sendiri untuk membenahi kemampuan dan ketrampilannya, karena kemampuan SDM sangat mempengaruhi keberhasilan.

3. Pendidikan berkelanjutan

Perlunya dilakukan pendidikan yang berkelanjutan oleh staff dalam suatu organisasi, misalnya dengan adanya pelatihan-pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan yang baik.

4. Membangun budaya etis

Budaya etis yang baik akan membentuk komitmen yang baik juga antar individu untuk bekerjasama. Kerjasama yang sehat dan baik akan mengoptimalkan penerapan transparansi.

5. Kebutuhan SKPD

Kebutuhan SKPD akan partisipasi masyarakat tentunya berpengaruh dalam penerapan transparansi. Masyarakat menyampaikan aspirasinya guna mendapatkan hak nya dalam memperoleh informasi.

2.1.8 Akuntabilitas

2.1.8.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atau sering disebut dengan *disclosure* atas kegiatan dan kinerja *financial* kepada pihak-pihak yang terkait. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu menjadi subjek penyedia informasi dalam rangka pemenuhan

hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Adha, 2014).

Menurut Sumadya dan Riharjo (2014) dalam Sari (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas yaitu suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, ataupun untuk menjawab dan menerangkan suatu kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum maupun pimpinan kolektif dalam keorganisasian kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas juga diartikan sebagai suatu kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana kinerja dan tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dalam meminta jawaban maupun keterangan dari orang atau badan yang telah dipercayai untuk mengelola sumber daya tertentu dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja secara periodik (Pramitha dan Khikmah, 2015).

Kesimpulan dari akuntabilitas yaitu suatu kewajiban pemberian informasi yang harus dilakukan oleh individu-individu maupun organisasi-organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara periodik kepada pihak-pihak terkait dan yang membutuhkan informasi tersebut.

2.1.8.2 Macam dan Dimensi Akuntabilitas Publik

Mahsun (2006) dalam Asroel (2016) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal

Dimana akuntabilitas vertikal dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah.

2. Akuntabilitas horizontal

Yaitu pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa ada empat dimensi dalam akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Yaitu termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program

Terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas.

Santoso (2013) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi publik terdiri dari beberapa dimensi, diantaranya adalah :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran dalam penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program yaitu program-program organisasi yang dapat diartikan sebagai program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan yang dimaksud adalah lembaga-lembaga publik yang semestinya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertanggungjawabkan dampak di masa yang akan datang.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, tidak ada pemberosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat diambil kesimpulan yaitu akuntabilitas dibagi menjadi beberapa instrument, dan pada dasarnya akuntabilitas tersebut merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan secara periodik dengan menggunakan dimensi yang berbeda.

2.1.8.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebagai pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja instansi pemerintah yang tercermin dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas menjadikan laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu :

1. Jujur

Seluruh informasi baik keuangan maupun aktivitas kinerja suatu organisasi harus dinformasikan secara jujur sesuai dengan realitas guna menciptakan kepercayaan yang baik pada masyarakat luas atau pihak-pihak yang terkait.

2. Objektif

Objektif yang dimaksud adalah suatu sikap pada individu yang lebih pasti dan dapat diyakini keabsahannya, serta dapat melibatkan perkiraan dan asumsi.

3. Transparan.

Transparan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan segala aktivitas baik menyusun keuangan maupun kinerja organisasi. Keseluruhan

informasi yang transparan diharapkan mampu menciptakan kepercayaan yang tinggi terhadap pengguna informasi tersebut.

Pramitha dan Khikmah (2015) memaparkan bahwa ada prinsip lain yang harus dicermati dalam penerapan akuntabilitas yaitu :

1. Prinsip pertanggungjawaban

Dimana hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan dan juga keberhasilan.

2. Prinsip prioritas

Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk strategi dalam tindak lanjut.

3. Prinsip manfaat

Ciri-ciri laporan keuangan yang baik yaitu relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi, verifiable, lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka disimpulkan prinsip-prinsip akuntabilitas merupakan suatu strategi yang digunakan oleh individu dalam organisasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan kepercayaan para pengguna informasi tersebut.

2.1.8.4 Tujuan Penerapan Akuntabilitas

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, memastikan bahwa suatu aktivitas telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang sah, serta untuk memastikan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Tujuan akuntabilitas juga untuk menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan (Sari, 2017). Perbedaan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan akuntabilitas adalah untuk menjauhkan terjadinya penyimpangan wewenang dan memastikan bahwa yang

seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi dalam koridor yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut untuk menciptakan kepercayaan seluruh pihak-pihak yang terkait.

2.1.8.5 Indikator-indikator Akuntabilitas

Menurut Sari (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas, yaitu :

1. Integritas keuangan

Integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan dapat diandalkan. Informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan.

2. Pengungkapan

Pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan kenyataan dari fenomena ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan.

2.1.9 Ketidakpastian Lingkungan

2.1.9.1 Pengertian Ketidakpastian Lingkungan

Isomorfisme mimetik (ketidakpastian lingkungan) yaitu kecenderungan organisasi untuk membentuk dirinya pada perilaku organisasi lain muncul sebagai tanggapan untuk suatu ketidakpastian pada suatu standar tertentu (Hastuti, 2015). Menurut Adha (2014) mendefinisikan ketidakpastian lingkungan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi yang berpotensi dapat mengganggu kinerja organisasi, apabila organisasi tersebut tidak mampu beradaptasi dengan laju perubahan maupun dinamikanya yang terdiri dari tingkat perubahan regulasi, perubahan teknologi informasi, dan juga tingkat perubahan pasar.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh (Syarmenda, 2016) ketidakpastian lingkungan yaitu situasi atau keadaan dimana seseorang terkendala untuk memprediksi keadaan disekitar, sehingga seseorang tersebut mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. *Isomorfisme mimetik* ini termasuk dalam benchmarking dan mengidentifikasi praktik terbaik

dilapangan. Perubahan peraturan yang cepat dalam suatu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi penyebab. Ketidakpastian menyebabkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Ridha dan Basuki,2012).

Rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru merupakan akibat dari ketidakpastian organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan. Didalam suatu keadaan yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon respon terbaik yang mungkin dapat dilakukan organisasi yaitu meniru organisasi lain yang mereka anggap lebih baik dari organisasinya sendiri. Keterandalan sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dari item-item yang telah diakui dan diukur dalam laporan keuangan, namun organisasi tetap menyajikan struktur formal yang berasal dari akun-akun yang bisa diterima (*acceptable account*) atas setiap aktivitas organisasi untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga yang dinamakan transparansi akan mendorong organisasi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses dan juga praktiknya dalam laporan keuangan guna memenuhi prasyarat kualitas keterandalan (*reliability*) (Sihaloho,2013).

Kesimpulan dari ketidakpastian lingkungan adalah suatu kondisi ataupun situasi yang dialami oleh individu dalam sebuah organisasi yang kesulitan memprediksi situasi disekitarnya karena adanya suatu perubahan-perubahan yang ketika organisasi tersebut tidak dapat mengikuti lajunya.

2.1.9.2 Tipe-tipe Ketidakpastian Lingkungan

Solin (2013) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan terdiri dari tiga tipe yaitu :

1. *Effect uncertainty*

Yaitu diartikan sebagai ketidakmampuan memprediksi pengaruh lingkungan dimasa yang akan datang terhadap suatu organisasi.

2. *Responds uncertainty*

Ketidakmampuan memprediksi konsekuensi dari pilihan-pilihan keputusan untuk merespon kondisi dalam lingkungan.

3. *Stated uncertainty*

Suatu hal yang selalu dihubungkan dengan ketidakpastian lingkungan yang dipersepsi atau bias dikatakan sebagai suatu anggapan.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa tipe ketidakpastian lingkungan merupakan suatu ketidakmampuan individu dalam organisasi untuk memprediksi sekitarnya dengan permasalahan yang kompleks.

2.1.9.3 Indikator-indikator Ketidakpastian Lingkungan

Menurut Ridha dan Basuki (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam ketidakpastian lingkungan yaitu:

1. Hubungan dengan lingkungan yang stabil

Ketidakpastian sendiri terjadi karena adanya peraturan yang berubah-ubah direntang waktu yang tidak menentu. Suatu organisasi apabila ingin penerapan transparansi tersebut ingin tercapai dengan maksimal diharapkan mampu menjaga kestabilan ketidakpastian lingkungan tersebut demi memenuhi tuntutan public.

2. Perbaikan legitimasi

Legitimasi dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan dan pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai, dan kepercayaan serta definisi yang dikembangkan secara sosial.

3. Informasi keuangan yg positif maupun negatif

Menyediakan informasi keuangan harus akurat sesuai dengan kebenarannya, karena entah informasi positif maupun negatif sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait.

4. Adopsi konsep

Menerapkan konsep transparansi belakangan ini menjadi tren didunia keuangan karena menjadi tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Meniru konsep transparansi organisasi lain yang telah berhasil merupakan salah satu cara atasan yg diberikan kepada bawahannya agar bisa dicontoh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

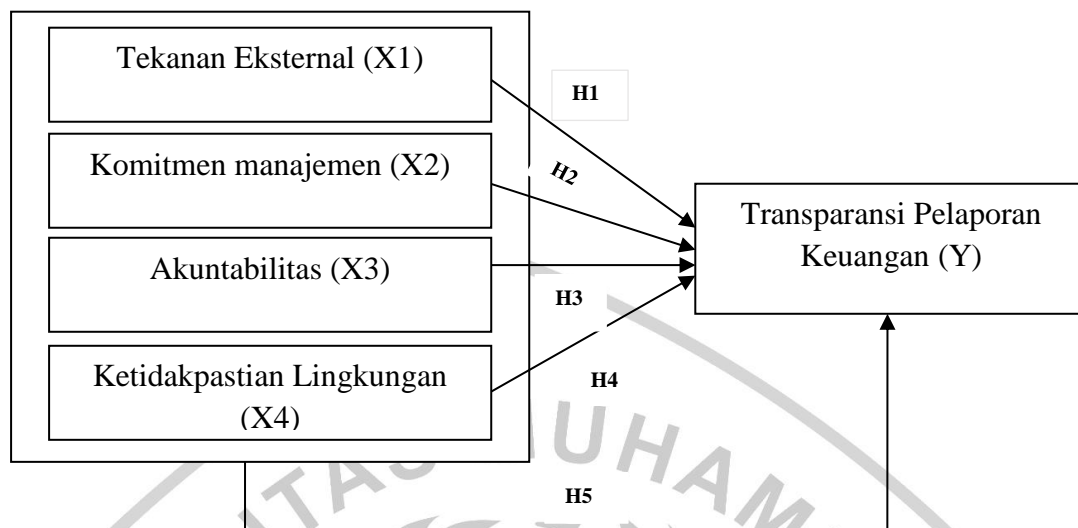
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Hasil
1	Ridha dan Basuki (2012)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Yogyakarta)	Tekanan eksternal dan komitmen manajemen memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, disisi lain ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2	Benny M.Putra (2015)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, Dan Kompetensi SDM terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab.Tegal)	Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, tapi pengendalian internal memiliki pengaruh.
3	Deddi Fardian (2014)	Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kota Padang)	Faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan
4	Johannes Sihaloho (2013)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Rokan Hilir)	Faktor tekanan eksternal dan komitmen manajemen memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
5	Yesnita Mutia (2016)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bukit Tinggi)	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu terdapat banyak faktor bagi pemerintahan daerah untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan, sehingga dalam penelitian kali ini diambil variabel independen tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Pada dasarnya transparansi pelaporan keuangan merupakan tuntutan dari masyarakat terlebih dari pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan yang transparan. Faktor tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan dianggap mampu mempengaruhi dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar organisasi, dimana jika terjadi tekanan atau desakan maupun dorongan yang tinggi maka penerapan transparansi akan semakin meningkat. Faktor yang kedua adalah komitmen manajemen, komitmen manajemen merupakan kerjasama antara individu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen manajemen yang tinggi pada suatu organisasi maka akan mempengaruhi tingkat penerapan transparansi yang tinggi pula. Sama halnya halnya dengan akuntabilitas, dimana ketika didalam organisasi terdapat akuntabilitas yang tinggi maka transparansi juga akan semakin maksimal.

Faktor terakhir yang dianggap mampu mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan yaitu situasi yang tidak pasti didalam suatu organisasi, yang membuat individu didalamnya sulit untuk memprediksi keadaan organisasi dimasa datang, namun biasanya atasan menyarankan untuk meniru organisasi yang telah berhasil dalam menjalankan operasionalnya.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Tekanan eksternal merupakan faktor luar organisasi yang dianggap dapat berpengaruh terhadap organisasi baik berpengaruh terhadap struktur maupun kegiatannya (Adha, 2014). Tekanan eksternal terjadi karena adanya peraturan atau undang-undang yang

berlaku dari pemerintah pusat khususnya mengenai transparansi pelaporan keuangan daerah, munculnya kritikan dari media massa, dan tuntutan dari pihak-pihak yang terkait terkait, serta adanya perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi adanya tekanan eksternal dalam suatu organisasi maka akan mempengaruhi peningkatan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah tersebut.

Didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) terhadap 149 SKPD di Provinsi D.I.Yogyakarta memaparkan bahwa pada faktor tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tekanan eksternal berupa undang-undang menjadi pendorong untuk diterapkannya transparansi pelaporan keuangan di SKPD Provinsi D.I.Yogyakarta.

Dari paparan diatas, hipotesis yang dirumuskan yaitu :

H₀₁ : Tekanan Eksternal tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

H_{a1} : Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

2.4.2 Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Komitmen manajemen diartikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, dan prioritas, serta tujuan suatu organisasi (Yesnita, 2016). Komitmen manajemen ditunjukkan dengan adanya individu yang selalu memperbaiki keterampilannya khususnya untuk mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan daerah, selain itu masing-masing individu berusaha untuk membangun budaya etis, dan mencoba untuk berpendidikan secara berkelanjutan. Sehingga dapat diartikan terjalannya komitmen manajemen yang tinggi pada suatu organisasi dianggap akan mendorong penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah menjadi maksimal, karena individu sangat memperhatikan kelangsungan organisasinya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Solin (2013) yang dilakukan pada SKPD Kota Padang menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah). Adanya pengaruh komitmen manajemen yang terkait membuat anggota organisasi dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih transparan sesuai dengan yang diinginkan oleh publik karena didalamnya tertanam kerja sama yang baik.

Dari paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan, yaitu :

H₀₂: Komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

H_{a2} : Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas program dan aktivitas yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Akuntabilitas dilaksanakan dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara benar dan akurat, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga diartikan bahwa setiap penerapan akuntabilitas yang tinggi, maka dianggap akan mempengaruhi proses transparansi pelaporan keuangan yang maksimal. Adanya pengaruh akuntabilitas pada penerapan transparansi, maka diyakini akan memberikan pengaruh yg baik dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang sekarang sedang marak terjadi di pemerintahan saat ini.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adha (2014) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peranan

yang penting terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah untuk publik.

Dari paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan, yaitu :

H₀₃ : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

H_{a3} : Akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

2.4.4 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor lingkungan yang dialami oleh suatu organisasi dan mampu berpotensi mengganggu kinerja, apabila organisasi tersebut tidak bisa beradaptasi secara baik dengan segala laju perubahan. Terjadinya ketidakpastian lingkungan dilihat dari adanya perubahan peraturan yang tidak sinkron dan pergantian jabatan dengan rentang waktu yang cepat. Namun pada saat terjadi ketidakpastian lingkungan tersebut, biasanya para atasan mengarahkan bawahannya untuk mengadopsi konsep transparansi organisasi lain yang dianggap telah berhasil.

Sehingga jika ketidakpastian lingkungan tinggi pada suatu orrganisasi, maka dianggap penerapan transparansi transparansi palaporan keuangan daerah akan semakin terdorong karena semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka masing-masing individu akan menyesuaikan dengan lingkungan barunya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fardian (2015) di SKPD Kota Padang menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Fardian, 2015), karena diyakini ketika terjadi ketidakpastian lingkungan maka pimpinan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi lain yang telah berhasil menerapkan transparansi seperti dengan mengadakan studi banding dengan organisasi lain.

Dari paparan diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu :

Ho4 : Ketidakpastian Lingkungan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

Ha4 : Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

2.4.5 Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Akuntabilitas dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Adanya tekanan eksternal, terjalinya komitmen manajemen, terbentuknya akuntabilitas, dan terjadinya ketidakpastian lingkungan dalam suatu organisasi maka secara simultan dianggap akan mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Semakin tinggi tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian, maka transparansi pelaporan keuangan daerah akan semakin terdorong.

Dari paparan diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu :

H₀₅: Tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan secara simultan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

H_{a5}: Tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.



